**Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah**
**Volume 4, Nomor 4, Oktober 2026**
e-ISSN :2988-2230 ; p-ISSN :2988-2249, Hal. 164-191
DOI: https://doi.org/10.59059/maslahah.v4i4.3632
*Tersedia:* https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah

# Sistem Inventaris ICT dan *Good Governance* Syariah: Analisis Pengelolaan Aset di PT Angkasa Pura Support Yogyakarta

## *ICT Inventory System and Sharia Good Governance: An Analysis of Asset Management at PT Angkasa Pura Support Yogyakarta*

**Hidayatullah[1], Lira Pilna[2]**
[1-2] STIE AMA Yogyakarta
*Email: hidayatullah@amayogyakarta.ac.id[1], Liarapilnaa@gmail.com[2]*
**Penulis Korespondensi: hidayatullah@amayogyakarta.ac.id*

**Abstract:** *Accurate inventory records help organisations track assets and account for their use. In Islamic economics, these responsibilities reflect trustworthiness and the protection of wealth. This study examines how the inventory system for information and communication technology (ICT) assets supports Sharia-based Good Governance at the Yogyakarta branch of PT Angkasa Pura Support. The study used a descriptive qualitative approach. Data were collected from 12 January to 31 March 2026 through observation, interviews with three staff members involved in inventory management, document review, and a literature review. The analysis involved data reduction, data display, and conclusion drawing. Interview accounts were cross-checked against observations and inventory documents. The findings show that staff inspect physical assets, reconcile administrative records with actual conditions, record inventory in Microsoft Excel, assign FA codes, IAS numbers, and QR codes, and document assets. These practices help staff identify, verify, and monitor assets. Viewed through Islamic economics, they support trustworthiness (amanah), accountability, efficiency (al-kafa'ah), and the protection of wealth (hifz al-mal). The findings illustrate how routine inventory procedures can support responsible corporate asset governance.*

***Keywords:*** *Amanah; Asset Management; ICT Inventory; Sharia Governance; Wealth Protection.*

**Abstrak:** Pencatatan inventaris yang akurat membantu perusahaan memantau aset dan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan amanah dan perlindungan harta. Penelitian ini menganalisis peran sistem inventaris aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung tata kelola yang baik berbasis syariah di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan pada 12 Januari hingga 31 Maret 2026 melalui observasi, wawancara dengan tiga personel yang terlibat dalam pengelolaan inventaris, penelaahan dokumen, dan studi pustaka. Analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen inventaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas memeriksa aset secara fisik, mencocokkan catatan administrasi dengan kondisi aktual, mencatat inventaris menggunakan Microsoft Excel, memberi identitas aset berupa kode FA, nomor IAS, dan kode QR, serta mendokumentasikan aset. Praktik ini membantu petugas mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengawasi aset. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut mendukung penerapan amanah, akuntabilitas, efisiensi (*al-kafa'ah*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Temuan ini menunjukkan bagaimana prosedur inventaris sehari-hari dapat mendukung tata kelola aset perusahaan yang bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Amanah; Inventaris TIK; Kelola Syariah; Pengelolaan Aset; Perlindungan Harta.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pengelolaan organisasi, termasuk dalam pengelolaan aset perusahaan. Transformasi digital mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas operasional (Nisa & others, 2026; Septian & others, 2026). Salah satu aspek yang menjadi perhatian penting adalah pengelolaan inventaris aset *Information and Communication*

*Naskah Masuk: 9 Agustus 2026; Revisi: 8 September 2026; Diterima: 9 Oktober 2026; Terbit: 30 Oktober 2026*

*Technology* (ICT), mengingat aset tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Peralatan ICT seperti komputer, laptop, *server, switch, printer, scanner*, dan perangkat jaringan merupakan aset bernilai tinggi yang memerlukan pengelolaan secara sistematis agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan (Harahap, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan aset perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan tata kelola organisasi (Sandini & others, 2025). Tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Konsep tata kelola tersebut dikenal dengan istilah *Good Governance* . Menurut Mardiasmo, *Good Governance* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran guna mencapai tujuan organisasi secara efektif (Mardiasmo, 2021:35-42)

Dalam perspektif Islam, konsep *Good Governance* tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tata kelola organisasi harus mencerminkan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, berkembang konsep *Good Governance Syariah* yang mengintegrasikan prinsip tata kelola modern dengan nilai-nilai Islam (Iqbal & others, 2024). Menurut Mardani, *Good Governance* syariah merupakan sistem pengelolaan organisasi yang mengedepankan nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan sebagai bentuk implementasi ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (Mardani, 2020:91-95)

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang relevan dengan pengelolaan aset adalah amanah. Islam memandang bahwa harta dan seluruh sumber daya yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelola aset perusahaan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga, memanfaatkan, serta mempertanggungjawabkan aset yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا**

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.*

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Selain amanah, pengelolaan aset dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan konsep *hifz al-mal* atau perlindungan harta. Konsep ini merupakan salah satu tujuan utama (*maqashid syariah*) yang bertujuan menjaga keberlangsungan, keamanan, dan kemanfaatan harta bagi individu maupun organisasi. Menurut Jasser Auda, hifz al-mal tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi harta dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga mencakup pengelolaan yang produktif, efisien, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Jasser Auda, 2021: 49-56).

Dalam konteks perusahaan modern, penerapan *hifz al-mal* dapat diwujudkan melalui sistem inventaris yang mampu memastikan seluruh aset tercatat dengan baik, mudah ditelusuri, serta dapat diawasi secara berkelanjutan. Sistem inventaris yang efektif tidak hanya membantu perusahaan dalam mengendalikan aset, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengawasan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, sistem inventaris dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan aset perusahaan.

PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendukung operasional bandar udara. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memanfaatkan berbagai perangkat *Information and Communication Technology* (ICT), antara lain komputer, laptop, *server, printer, scanner, switch*, UPS, monitor, dan perangkat jaringan lainnya. Perangkat tersebut mendukung aktivitas administrasi, komunikasi, pengolahan informasi, dan kebutuhan teknis operasional. Pengelolaan inventaris ICT dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan di gudang dan melibatkan personel yang menangani fungsi *workshop, Equipment & Technology*, serta administrasi inventaris (Lira Pilna, 2026).

Berdasarkan hasil observasi yang tercatat dalam dokumen penelitian, pendataan inventaris dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi dengan kondisi aktual, pemberian identitas aset, dokumentasi, dan pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Setiap aset yang diperiksa menggunakan identitas berupa kode FA, nomor IAS, dan QR Code. Identitas tersebut menjadi sarana untuk mengenali dan mencocokkan aset fisik dengan informasi yang tercantum dalam daftar inventaris. Dengan demikian, objek penelitian tidak hanya mencakup media pencatatan, tetapi juga rangkaian kegiatan pengendalian aset yang dilakukan oleh personel terkait.

Meskipun demikian, penelitian mengenai sistem inventaris selama ini umumnya masih berfokus pada aspek teknis, seperti pengembangan aplikasi, database, sistem berbasis web,

maupun peningkatan efisiensi operasional. Penelitian (Fadli, dkk, 2023: 112-124) menyoroti sistem pendataan material berbasis website untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan gudang. Penelitian Sujacka Retno, Cut Agusniar, dan Ilmi Suciani Sinambela (Retno, dkk, 2020: 145-156) membahas digitalisasi inventaris dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi. Sementara itu, penelitian Kurniawan Kokanda dan Ilwan Syafrinal (Kokanda, 2024: 15-28) menekankan optimalisasi manajemen stok melalui sistem inventory berbasis web.

Kajian yang menghubungkan sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) dengan prinsip *Good Governance* Syariah masih relatif terbatas. Padahal, sistem inventaris tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai amanah, akuntabilitas, transparansi, efisiensi (*al-kafa'ah*), dan perlindungan aset (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana sistem pendataan inventaris ICT dapat mendukung implementasi *Good Governance* berbasis Syariah dalam pengelolaan aset perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai sistem inventaris umumnya menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk memperbaiki proses pencatatan, pengelolaan stok, dan pelaporan barang. Fokus tersebut penting karena sistem informasi dapat membantu organisasi menghasilkan data inventaris yang lebih terstruktur. Namun, orientasi teknis tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana prosedur inventaris berhubungan dengan nilai etika dan tanggung jawab dalam perspektif ekonomi Islam. Secara khusus, masih diperlukan analisis mengenai bagaimana ketepatan pencatatan, pemeriksaan fisik, identifikasi aset, pembatasan kewenangan, dan pelaporan inventaris dapat dibaca melalui prinsip amanah, akuntabilitas, serta *hifz al-mal.*

Kesenjangan tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya menilai inventaris ICT sebagai kegiatan administrasi atau penggunaan teknologi, tetapi menganalisis hubungan antara aktivitas pengelolaan aset dan prinsip *Good Governance* berbasis Syariah. Transparansi dianalisis melalui ketersediaan dan keterlacakan informasi aset. Akuntabilitas dianalisis melalui pemeriksaan, dokumentasi, dan pelaporan. Amanah dikaji melalui tanggung jawab personel dalam mencatat serta menjaga aset. Sementara itu, hifz al-mal dianalisis melalui praktik identifikasi, pemeriksaan kondisi, dan pengawasan aset. Efisiensi atau al-kafa'ah dikaji melalui penggunaan informasi inventaris untuk mendukung pekerjaan pengelolaan aset, bukan melalui klaim penghematan yang belum diukur.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan hubungan analitis antara prosedur inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) dan prinsip tata kelola syariah

berdasarkan praktik lapangan di lingkungan perusahaan penyedia layanan pendukung operasional bandar udara. Dengan demikian, kebaruan penelitian tidak semata-mata terletak pada lokasi penelitian, tetapi pada penggunaan indikator empiris untuk membaca praktik inventaris melalui perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga membatasi kesimpulannya pada konteks pengelolaan inventaris ICT di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh perusahaan atau unit kerja lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem pendataan inventaris ICT dalam mendukung *Good Governance* berbasis Syariah pada pengelolaan aset perusahaan di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam bidang tata kelola aset dan manajemen organisasi berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi perusahaan dalam mengembangkan sistem pengelolaan aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### *Good Governance* Syariah

Konsep *Good Governance* Syariah merupakan perkembangan dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang tidak hanya menekankan efisiensi organisasi dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pencapaian tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Dalam tata kelola syariah, organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham dan regulator, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT. Hal ini menjadikan tata kelola syariah memiliki dimensi etika yang lebih luas dibandingkan tata kelola konvensional (Fredy Dwi Herlyanto, 2020).

Dalam konteks pengelolaan aset perusahaan, penerapan *Good Governance* Syariah menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap prinsip amanah sehingga aset dapat dikelola secara optimal serta terhindar dari penyalahgunaan dan pemborosan (dewi, sandra and Shandy, Andrew, 2020).

Menurut Mardani, *Good Governance* Syariah adalah sistem tata kelola yang menekankan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan (*fairness*), serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2020:91-98). Sedangkan Ascarya berpendapat, tata kelola syariah bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai prinsip

syariah sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan (Ascarya, 2020:45-48)

Dari perspektif ekonomi Islam, *Good Governance* Syariah memiliki hubungan yang erat dengan konsep:

1. Amanah (kepercayaan)
2. Hisbah (pengawasan)
3. Mas'uliyyah (akuntabilitas)
4. Hifz al-Mal (perlindungan harta)

Aset organisasi dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem inventarisasi aset yang akurat, pengawasan penggunaan aset, serta pelaporan yang transparan merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip hifz al-mal dalam tata kelola Syariah (Rifqi Muhammad, 2020).

**Amanah dalam Pengelolaan Aset**

Amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi Islam. Secara terminologis, amanah berarti kepercayaan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab tersebut.

Menurut Rozalinda, amanah merupakan prinsip dasar yang mengharuskan setiap individu maupun organisasi mengelola sumber daya yang dimiliki secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab (Rozalinda, 2022:137-141)

Dalam lingkungan perusahaan, amanah tercermin melalui:

1. Ketepatan pencatatan aset.
2. Kejujuran dalam pelaporan.
3. Penggunaan aset sesuai peruntukan.
4. Pencegahan penyalahgunaan aset.
5. Pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya perusahaan.

Sistem inventaris yang baik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi prinsip amanah karena memungkinkan pengawasan aset dilakukan secara lebih akurat dan sistematis.

Konsep amanah dalam pengelolaan aset merupakan prinsip fundamental ekonomi Islam yang menuntut setiap individu maupun organisasi untuk mengelola sumber daya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Pencatatan aset yang akurat, pelaporan yang transparan, penggunaan aset sesuai peruntukan, serta pencegahan penyalahgunaan aset merupakan manifestasi nyata dari nilai amanah dalam lingkungan perusahaan.

Namun demikian, implementasi amanah tidak cukup hanya melalui penyediaan sistem inventaris yang baik. Keberhasilannya juga sangat dipengaruhi oleh integritas sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, budaya organisasi, dan kesadaran spiritual para pengelola aset. Oleh karena itu, sistem inventaris hendaknya dipandang sebagai alat pendukung yang harus diiringi dengan internalisasi nilai-nilai amanah agar tujuan pengelolaan aset yang efektif, efisien, dan sesuai syariah dapat terwujud secara optimal.

**Hifz al-Mal**

Hifz al-mal merupakan salah satu unsur utama dalam Maqashid Syariah yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan harta. Konsep ini bertujuan menjaga keberlangsungan aset agar tidak hilang, rusak, disalahgunakan, atau dimanfaatkan secara tidak produktif.

Menurut Jasser Auda, perlindungan harta dalam maqashid syariah mencakup upaya menjaga aset, mengembangkan nilainya, meningkatkan produktivitasnya, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan (Jasser Auda, 2021:49-56). Sedangkan menurut Kamali perlindungan harta dalam maqashid syariah mencakup upaya menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan (Kamali, 2021:115-128). Berbeda dengan Rozalina yang mengatakan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus dilakukan secara amanah, produktif, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah (Rozalinda, 2022:137-141).

Dalam organisasi modern, implementasi hifz al-mal dapat diwujudkan melalui:

1) Sistem inventaris aset.
2) Pengendalian internal.
3) Audit aset berkala.
4) Digitalisasi data aset.
5) Monitoring dan evaluasi penggunaan aset.

Dengan demikian, sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) merupakan salah satu instrumen praktis dalam mewujudkan perlindungan aset perusahaan sesuai prinsip maqashid syariah.

**Sistem Inventaris ICT**

Sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, memantau, dan mengendalikan aset teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki organisasi. Aset tersebut meliputi komputer, laptop, server, printer, switch, scanner, UPS, dan perangkat jaringan lainnya.

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, sistem informasi inventaris berfungsi menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung pengambilan

keputusan organisasi (Laudon & Laudon, 2022:52-58). Sementara itu, menurut Abdul Kadir, sistem inventaris yang baik harus mampu menjamin integritas data, kemudahan akses informasi, keamanan data, dan efektivitas pengawasan aset(Abdul Kadir, 2020;89-95).

Pandangan Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon menegaskan bahwa sistem informasi yang baik harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk mendukung proses manajerial. Dalam konteks inventaris ICT, kualitas informasi tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mendukung operasional organisasi secara langsung.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem inventaris ICT dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung implementasi prinsip amanah, mas'uliyyah (tanggung jawab), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Seluruh aset organisasi merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kemaslahatan.

Sistem inventaris yang baik membantu organisasi:

1. Menjaga keberadaan aset (*asset safeguarding*).
2. Mencegah pemborosan dan penyalahgunaan aset.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset.
4. Menjamin transparansi pengelolaan sumber daya.
5. Mendukung pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, inventarisasi aset bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, sistem inventaris ICT dipahami sebagai mekanisme pengelolaan aset berbasis data yang berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta mendukung implementasi *Good Governance* berbasis Syariah melalui perlindungan aset (*hifz al-mal*) dan pelaksanaan amanah dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

**Tabel 1.** Dimensi dan indikator analisis inventaris ICT berbasis *Good Governance* Syariah

| Dimensi | Indikator empiris | Bukti yang perlu diperiksa |
|---|---|---|
| Transparansi | Ketersediaan informasi aset, kejelasan identitas, kesesuaian data dengan kondisi fisik | Daftar inventaris, label FA, nomor IAS, QR Code, hasil pencocokan fisik |
| Akuntabilitas | Kejelasan petugas, pemeriksaan aset, dokumentasi, pelaporan | Keterangan informan, catatan pemeriksaan, laporan inventaris |
| Amanah | Ketelitian pencatatan, tanggung jawab menjaga aset, penggunaan sesuai peruntukan | Hasil observasi, wawancara petugas, dokumen penyerahan atau penggunaan aset jika tersedia |
| Hifz al-mal | Identifikasi aset, pemeriksaan kondisi, pemantauan keberadaan, tindak lanjut aset rusak atau tidak digunakan | Daftar inventaris, dokumentasi kondisi, catatan pemeliharaan atau penggantian |
| Al-kafa'ah | Kemudahan pencarian informasi, dukungan data terhadap pekerjaan, ketepatan proses administrasi | Alur kerja, wawancara informan, contoh penggunaan data dalam pemeliharaan atau distribusi |

Tabel tersebut membedakan prinsip normatif dan indikator lapangan. Sebagai contoh, keberadaan QR Code merupakan bukti adanya identitas aset. Namun, keberadaan QR Code saja belum membuktikan bahwa perusahaan telah menerapkan amanah. Untuk menghubungkannya dengan amanah, hal ini menunjukkan tanggung jawab petugas dalam menggunakan, memperbarui, dan menjaga kebenaran data aset.

Demikian pula, pemeriksaan fisik dan pencocokan daftar inventaris dapat mendukung analisis *hifz al-mal*. Akan tetapi, praktik tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kehilangan aset telah menurun. Kesimpulan tentang penurunan kehilangan memerlukan data pembanding, misalnya catatan kehilangan sebelum dan sesudah penerapan prosedur.

## 3. METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses pendataan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) dan praktik pengendalian aset berdasarkan kondisi yang berlangsung di lingkungan perusahaan. Fokus penelitian mencakup tahapan pemeriksaan fisik, pencatatan, identifikasi, pencocokan data, dokumentasi, dan penggunaan informasi inventaris dalam kegiatan pengelolaan aset.

Penelitian dilaksanakan di gudang PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta yang berada di area Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Pengumpulan data berlangsung pada 12 Januari sampai 31 Maret 2026. Informan penelitian berjumlah tiga orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan inventaris ICT, yaitu Yuli Prasetyo selaku PTS Kepala Workshop, Alip Ageng K. selaku personel Equipment & Technology, dan Mutiara Nur Azizah selaku admin. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam kegiatan pengawasan, penanganan peralatan, dan administrasi inventaris (Lira Pilna, 2026).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan ketiga informan. Observasi diarahkan pada kegiatan pemeriksaan fisik aset, pencocokan informasi inventaris dengan kondisi aktual, penggunaan identitas aset, pencatatan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali penjelasan informan mengenai alur kerja, pembagian tugas, penggunaan data inventaris, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan asset (Lexy J. Moleong, 2021). Data sekunder diperoleh dari dokumen inventaris, arsip administrasi, dokumentasi kegiatan, dan literatur yang relevan. Dokumen perusahaan yang digunakan dalam analisis perlu dibatasi pada dokumen yang telah memperoleh izin untuk diperiksa dan dipublikasikan (Sugiono, 2013; Sugiyono, 2023).

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilah catatan observasi, hasil wawancara, dan dokumen berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema pemeriksaan fisik, pencatatan inventaris, identifikasi aset, pengawasan, pelaporan, dan penggunaan informasi aset. Pada tahap penyajian, peneliti membandingkan keterangan antarinforman dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan informasi yang belum memperoleh dukungan bukti. Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan pola temuan yang konsisten dan memeriksa kembali kesesuaiannya dengan sumber data (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2014).

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai contoh, keterangan informan mengenai penggunaan kode FA dan QR Code perlu diperiksa melalui pengamatan label aset dan pencocokannya dengan daftar inventaris. Keterangan mengenai pelaporan inventaris juga perlu dibandingkan dengan dokumen laporan yang dapat diakses peneliti. Identitas aset, nama personel, dan informasi internal yang bersifat rahasia disamarkan dalam penyajian hasil penelitian (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2014).

Penting: uraian triangulasi di atas merupakan rumusan prosedur yang disarankan berdasarkan teknik pengumpulan data dalam dokumen sumber. Penulis harus memastikan bahwa pemeriksaan silang tersebut memang dilakukan. Jangan mencantumkan prosedur izin, persetujuan, atau penyamaran data sebagai kegiatan yang telah dilakukan jika tidak ada dasar faktualnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Sistem Pendataan Inventaris ICT di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta

Unit *Information and Communication Technology* (ICT) pada PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan melalui pengelolaan berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Aset yang dikelola meliputi komputer, laptop, server, monitor, switch, scanner, UPS, telepon seluler, dan berbagai perangkat jaringan lainnya yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan (Lira Pilna, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan inventaris ICT di gudang PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dengan pemeriksaan fisik peralatan yang tersedia di gudang. Petugas kemudian mencocokkan kondisi dan jumlah aset dengan informasi dalam daftar inventaris. Setiap peralatan menggunakan identitas berupa kode FA, nomor IAS, dan QR Code. Identitas tersebut membantu petugas mengenali aset dan mencocokkan informasi fisik dengan catatan administrasi. Proses pendataan juga dilengkapi dokumentasi kondisi aset dan pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Temuan mengenai tahapan tersebut sejalan dengan uraian observasi dalam dokumen Tugas Akhir Lira Pilna.

Untuk memperjelas proses verifikasi, penulis dapat menyajikan contoh alur pemeriksaan menggunakan identitas aset yang telah dianonimkan. Contoh berikut merupakan format ilustrasi, bukan data aset aktual.

**Tabel 2.** Contoh alur pemeriksaan menggunakan identitas aset

| Tahap | Contoh informasi yang diperiksa |
|---|---|
| Identifikasi fisik | Perangkat ICT dengan identitas disamarkan |
| Kode aset | FA-XXXX |
| Nomor IAS | IAS-XXXX |
| QR Code | Kode disamarkan atau ditampilkan dalam bentuk ilustrasi |
| Pemeriksaan daftar | Mencocokkan identitas pada aset dengan daftar inventaris |
| Pemeriksaan kondisi | Mencatat kondisi fisik sesuai hasil pengamatan |
| Hasil verifikasi | Sesuai, perlu pembaruan data, atau memerlukan pemeriksaan lanjutan |

Dari perspektif manajemen aset, sistem inventaris berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang memungkinkan perusahaan mengetahui keberadaan, kondisi, dan status penggunaan aset secara tepat. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, sistem inventaris tidak hanya dipandang sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga amanah dan melindungi harta perusahaan (*hifz al-mal*). Menurut Hastings, sistem inventaris merupakan bagian penting dari manajemen aset karena menyediakan informasi yang akurat mengenai identifikasi, kondisi, lokasi, dan siklus hidup aset perusahaan (Nicholas A. J. Hastings., 2021:12).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem pendataan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta telah dilaksanakan melalui tahapan yang cukup sistematis, mulai dari pengecekan fisik aset, pencocokan data inventaris, pemberian identitas aset, dokumentasi kondisi aset, hingga penyusunan laporan inventaris secara berkala. Proses tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menerapkan pengendalian internal untuk memastikan akurasi data aset serta mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya teknologi informasi.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Nicholas A. J. Hastings yang menyatakan bahwa sistem inventaris merupakan bagian integral dari manajemen aset karena menyediakan informasi mengenai identitas, lokasi, kondisi, dan siklus hidup aset yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Melalui inventarisasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset serta meminimalkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan aset (Nicholas A. J. Hastings., 2021:12-25).

Dari perspektif tata kelola organisasi, penerapan kode FA, nomor IAS, dan QR Code menunjukkan adanya mekanisme identifikasi aset yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan sistem identifikasi tersebut memudahkan proses pelacakan aset serta meningkatkan keandalan informasi yang digunakan dalam kegiatan audit dan pengawasan internal.

Penelitian menemukan bahwa Microsoft Excel masih digunakan sebagai media utama pencatatan inventaris ICT. Penggunaan aplikasi tersebut memungkinkan petugas menyusun dan memperbarui daftar aset sesuai kebutuhan administrasi. Namun, penggunaan spreadsheet juga memiliki keterbatasan apabila jumlah aset, pengguna, dan kebutuhan integrasi informasi semakin berkembang. Risiko seperti kesalahan input, duplikasi data, perubahan tanpa dokumentasi yang memadai, dan keterlambatan pembaruan merupakan potensi risiko yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan spreadsheet. Penelitian ini belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh risiko tersebut benar-benar terjadi di lokasi penelitian. Karena itu, risiko tersebut ditempatkan sebagai keterbatasan potensial dari media pencatatan, bukan sebagai temuan empiris.

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, sistem informasi yang efektif harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan guna mendukung proses pengambilan keputusan manajemen (Laudon & Laudon, 2022:52-58). Oleh karena itu, pengembangan sistem inventaris berbasis database atau aplikasi asset management terintegrasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan aset *Information and Communication Technology* (ICT) di masa mendatang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem inventaris yang diterapkan tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mengandung nilai amanah dan hifz al-mal. Amanah tercermin melalui upaya perusahaan dalam melakukan pencatatan aset secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, prinsip hifz al-mal diwujudkan melalui kegiatan pengawasan, pendataan, dan pemeliharaan aset yang bertujuan menjaga harta perusahaan dari kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan.

Jasser Auda menjelaskan bahwa hifz al-mal dalam maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga pada pengembangan, optimalisasi, dan keberlanjutan manfaat aset bagi organisasi dan masyarakat (Jasser Auda, 2022;247-255). Dengan demikian, inventarisasi aset ICT di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta dapat dipandang sebagai salah satu implementasi praktis maqashid syariah dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

Secara keseluruhan, sistem inventaris ICT yang diterapkan telah mendukung fungsi pengendalian aset dan tata kelola organisasi. Namun, peningkatan digitalisasi sistem inventaris, integrasi data aset, serta penguatan mekanisme monitoring berbasis teknologi masih diperlukan agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip *Good Governance* Syariah.

**Peran Sistem Pendataan Inventaris ICT dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Aset**

Salah satu prinsip utama *Good Governance* Syariah adalah transparansi (*transparency*). Transparansi menuntut organisasi menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Penggunaan kode FA, nomor IAS, dan QR Code merupakan bagian dari mekanisme identifikasi inventaris ICT. Identitas tersebut dapat membantu petugas membedakan satu aset dari aset lainnya serta mencocokkan perangkat fisik dengan data administrasi. Dalam konteks penelitian ini, keterlacakan aset perlu dinilai berdasarkan kesesuaian identitas pada perangkat dengan informasi yang tercantum dalam daftar inventaris. Dengan demikian, keberadaan label tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh aset dapat dilacak secara efektif. Penilaian keterlacakan memerlukan pemeriksaan silang terhadap aset fisik dan catatan inventaris. Informasi yang bersifat rahasia dapat disamarkan tanpa menghilangkan penjelasan mengenai prosedur verifikasinya.

Penggunaan sistem identifikasi tersebut memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mempermudah proses pencarian aset.
2. Mengurangi kesalahan pencatatan.
3. Mempercepat proses verifikasi data.
4. Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai status aset.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi merupakan implementasi nilai *shidq* (kejujuran) yang menjadi salah satu karakter utama dalam aktivitas ekonomi. Menurut Mardani, transparansi dalam tata kelola syariah bertujuan menciptakan keterbukaan informasi

yang mampu mencegah terjadinya manipulasi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang merugikan organisasi.

Keberadaan data inventaris yang terdokumentasi dengan baik menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset. Informasi mengenai jenis barang, merek, model, nomor seri, kondisi barang, dan lokasi penyimpanan dapat diketahui secara jelas sehingga memudahkan proses pengawasan internal perusahaan (Lira Pilna, 2026).

Menurut James A. Hall bahwa sistem informasi akuntansi dan inventaris yang baik berfungsi sebagai alat pengendalian internal untuk melindungi aset organisasi dari kehilangan, penyalahgunaan, maupun kesalahan pencatatan.

Dengan demikian, sistem pendataan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) berperan penting dalam mendukung transparansi pengelolaan aset yang menjadi salah satu indikator *Good Governance* berbasis Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendataan inventaris ICT di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta telah mendukung penerapan prinsip transparansi melalui penggunaan identitas aset berupa kode inventaris, nomor IAS, dan QR Code. Sistem identifikasi tersebut memungkinkan setiap aset memiliki informasi yang jelas dan dapat ditelusuri sehingga mempermudah proses pencarian, verifikasi, dan pengawasan aset perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang mendukung keterbukaan informasi. Ketersediaan data mengenai jenis aset, nomor seri, spesifikasi, kondisi, lokasi, dan status penggunaan aset memungkinkan manajemen memperoleh informasi yang lebih akurat dalam melakukan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset.

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, sistem informasi yang efektif harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan organisasi secara efektif (Laudon & Laudon, 2022:52-58). Dalam konteks penelitian ini, keberadaan sistem inventaris membantu menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses monitoring dan pengendalian aset secara berkelanjutan.

Dari perspektif *Good Governance* Syariah, transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan keterbukaan informasi serta mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan. Transparansi juga berkaitan erat dengan nilai shidq (kejujuran) yang menuntut setiap informasi disampaikan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan data inventaris yang terdokumentasi secara sistematis menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset. Informasi aset yang terdokumentasi dengan baik dapat meminimalkan potensi manipulasi data, penyalahgunaan aset, maupun kesalahan pencatatan yang dapat merugikan perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan data inventaris masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media utama pencatatan. Walaupun aplikasi tersebut cukup membantu dalam pengelolaan data, terdapat beberapa keterbatasan seperti risiko human error, kemungkinan duplikasi data, keterbatasan akses secara real-time, serta rendahnya integrasi dengan sistem informasi lainnya. Kondisi ini dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi yang lebih optimal apabila jumlah aset yang dikelola semakin besar.

Menurut James A. Hall, sistem informasi inventaris yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan melindungi aset organisasi dari kehilangan, penyalahgunaan, dan kesalahan pencatatan (James A. Hall, 2023: 41–52). Oleh karena itu, efektivitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh kualitas sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengamankan data tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi bukan sekadar keterbukaan informasi administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dalam menjaga amanah. Transparansi yang baik memungkinkan seluruh aktivitas pengelolaan aset dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta).

Dengan demikian, sistem pendataan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta telah berkontribusi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan aset melalui penyediaan informasi yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, peningkatan digitalisasi sistem inventaris dan integrasi data aset masih diperlukan untuk memperkuat kualitas transparansi serta mendukung penerapan *Good Governance* Syariah yang lebih optimal.

**Peran Sistem Inventaris ICT dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset**

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kewajiban setiap pengelola organisasi untuk mempertanggungjawabkan tugas dan sumber daya yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) yang diterapkan di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset

perusahaan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengecekan fisik aset secara berkala, pencocokan data inventaris dengan kondisi aktual, dokumentasi aset, serta penyusunan laporan inventaris yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Proses tersebut memungkinkan perusahaan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap seluruh aset yang dikelola (Lira Pilna, 2026: 52).

Pengelolaan data inventaris juga berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam proses pencatatan dan pembaruan informasi. Pembatasan hak akses dapat menjadi bagian dari pengendalian internal karena tidak semua personel perlu memiliki kewenangan untuk mengubah data inventaris. Namun, penelitian perlu menjelaskan mekanisme pembatasan tersebut secara konkret. Jika pencatatan menggunakan Microsoft Excel, penulis perlu memeriksa apakah pembatasan dilakukan melalui pengaturan file, kata sandi, penyimpanan pada perangkat tertentu, atau prosedur administratif lainnya. Penulis juga perlu membedakan pembatasan akses dari mekanisme jejak audit otomatis. Tanpa bukti tentang riwayat perubahan, penelitian tidak dapat menyatakan bahwa setiap perubahan data telah tercatat secara otomatis dan dapat ditelusuri berdasarkan pengguna. Dengan adanya pembatasan akses tersebut, setiap perubahan data dapat ditelusuri berdasarkan pihak yang melakukan input maupun pembaruan data, sehingga risiko manipulasi data, kehilangan informasi, maupun penyalahgunaan aset dapat diminimalkan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat James A. Hall yang menyatakan bahwa sistem informasi yang baik harus mampu mendukung fungsi pengendalian internal melalui pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri, perlindungan aset organisasi, serta penyediaan informasi yang andal untuk kepentingan manajemen (James A. Hall, 2023:41-52). Dalam konteks inventarisasi aset, kemampuan sistem untuk menyediakan jejak dokumentasi (*audit trail*) merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi.

Dari perspektif *Good Governance*, akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut adanya kejelasan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporan dalam setiap aktivitas organisasi. Sistem inventaris yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan perusahaan mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu aset, bagaimana kondisi aset tersebut, serta bagaimana riwayat penggunaannya. Dengan demikian, proses pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun manajerial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas dibandingkan konsep akuntabilitas konvensional. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada atasan, pemegang saham, atau organisasi, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki seluruh harta yang ada di muka

bumi. Konsep ini dikenal dengan istilah *hisab*, yaitu proses pertanggungjawaban atas seluruh amanah yang diberikan kepada manusia.

Menurut Rozalinda, seluruh sumber daya yang berada dalam penguasaan individu maupun organisasi pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dipergunakan sesuai dengan tujuan yang benar (Rozalinda, 2022:137-141). Oleh karena itu, pencatatan aset yang akurat, pelaporan yang jujur, dan pengawasan yang berkelanjutan merupakan bentuk implementasi nilai amanah dalam aktivitas organisasi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem inventaris masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media utama pencatatan data. Meskipun cukup efektif untuk mendukung administrasi inventaris, penggunaan Excel memiliki beberapa keterbatasan, seperti tingginya ketergantungan pada ketelitian operator, risiko kesalahan input data, keterbatasan pencatatan histori perubahan data secara otomatis, dan rendahnya integrasi dengan sistem informasi lainnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas akuntabilitas apabila jumlah aset yang dikelola semakin besar dan kompleks.

Oleh karena itu, untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset, perusahaan dapat mempertimbangkan pengembangan sistem inventaris berbasis database atau aplikasi asset management yang memiliki fitur audit trail, kontrol akses pengguna, pencatatan histori perubahan data, dan pelaporan otomatis. Pengembangan tersebut akan meningkatkan keandalan informasi aset sekaligus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

Dengan demikian, sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) yang diterapkan di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta telah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset melalui pencatatan yang sistematis, pengawasan yang berkelanjutan, dan pelaporan yang terstruktur. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip *Good Governance* Syariah karena mendukung pelaksanaan amanah, memperkuat pertanggungjawaban, serta menjaga aset perusahaan sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah, khususnya hifz al-mal.

**Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Inventaris ICT**

Amanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Amanah menuntut setiap individu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta tercermin melalui kegiatan pengecekan fisik aset secara berkala,

pencocokan data inventaris dengan kondisi aktual, pelaporan inventaris, serta pengendalian akses terhadap data aset. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menjaga keakuratan informasi dan memastikan bahwa seluruh aset yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Lira Pilna, 2026).

Dalam perspektif manajemen aset, ketepatan data inventaris merupakan faktor penting karena menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pemeliharaan, pengawasan aset, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, kegiatan verifikasi data yang dilakukan secara rutin menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga kualitas informasi aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Rozalinda, amanah merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang mengharuskan setiap individu mengelola sumber daya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab karena seluruh harta pada hakikatnya merupakan titipan Allah SWT yang harus dipergunakan sesuai dengan tujuan yang benar (Rozalinda, 2022:137-141). Dalam konteks penelitian ini, amanah tidak hanya tercermin pada aspek kejujuran dalam pencatatan aset, tetapi juga pada kesungguhan petugas inventaris dalam memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan.

Dari perspektif *Good Governance* Syariah, amanah merupakan fondasi yang mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi. Ketelitian dalam pencatatan aset, pelaporan berkala, serta pengawasan penggunaan aset menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan tata kelola yang mengedepankan integritas dan profesionalisme.

Selain itu, pengendalian akses terhadap data inventaris juga menunjukkan adanya upaya menjaga keamanan informasi aset. Pembatasan hak akses kepada pihak yang berwenang merupakan bentuk perlindungan terhadap data perusahaan sekaligus mendukung prinsip amanah dalam menjaga informasi yang dipercayakan kepada organisasi.

Namun demikian, implementasi amanah dalam pengelolaan inventaris tidak hanya dapat diukur dari keberadaan prosedur administrasi yang baik. Amanah juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Sebaik apa pun sistem inventaris yang digunakan, risiko kesalahan pencatatan, kelalaian, atau penyalahgunaan aset tetap dapat terjadi apabila tidak didukung oleh integritas dan kesadaran moral para pengelolanya.

Dalam hal ini, penggunaan Microsoft Excel sebagai media utama pencatatan inventaris masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada ketelitian operator, risiko perubahan data secara manual, dan keterbatasan dalam pencatatan histori aktivitas pengguna.

Oleh karena itu, penguatan sistem melalui penggunaan aplikasi manajemen aset yang memiliki fitur audit trail dan kontrol akses yang lebih baik dapat membantu memperkuat implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan inventaris.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, amanah dalam tata kelola Islam tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan, tetapi juga mencakup kompetensi, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada seseorang (Kamali, 2021:187-192). Dengan demikian, amanah dalam pengelolaan aset harus diwujudkan melalui kombinasi antara sistem yang baik dan perilaku individu yang berintegritas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta telah mendukung implementasi prinsip amanah melalui pencatatan aset yang sistematis, verifikasi data secara berkala, pelaporan inventaris, serta pengawasan penggunaan aset. Praktik tersebut tidak hanya mendukung efektivitas pengelolaan aset perusahaan, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas organisasi.

**Sistem Inventaris ICT sebagai Implementasi Hifz al-Mal**

Konsep *hifz al-mal* merupakan salah satu tujuan utama Maqashid Syariah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan harta.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, prinsip *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan harta agar tetap terjaga serta memberikan manfaat. Pada pengelolaan inventaris ICT, prinsip ini dapat dianalisis melalui praktik identifikasi aset, pemeriksaan fisik, pencocokan data, dokumentasi kondisi, dan pengawasan keberadaan peralatan. Praktik tersebut menunjukkan adanya prosedur administratif yang mendukung perlindungan aset perusahaan. Akan tetapi, penelitian ini belum menyajikan data pembanding mengenai tingkat kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset sebelum dan sesudah prosedur inventaris diterapkan. Oleh sebab itu, hasil penelitian lebih tepat menyimpulkan bahwa sistem inventaris mendukung upaya perlindungan aset, bukan telah terbukti menurunkan angka kehilangan atau kerusakan. Penggunaan kode inventaris, nomor identifikasi aset, QR Code, dokumentasi kondisi fisik aset, verifikasi berkala, dan rekonsiliasi data pada saat closing bulanan merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aset dapat teridentifikasi, terlacak, dan terawasi dengan baik (Lira Pilna, 2026).

Dari perspektif manajemen aset, mekanisme tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keamanan aset (*asset safeguarding*), meningkatkan akurasi data inventaris, serta memudahkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Sistem inventaris yang terstruktur memungkinkan organisasi mengetahui lokasi, kondisi, status penggunaan, serta

riwayat aset secara lebih akurat sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan maupun penyalahgunaan aset.

Menurut Nicholas A. J. Hastings, inventarisasi aset merupakan bagian penting dari manajemen aset karena menyediakan informasi mengenai identitas, kondisi, lokasi, nilai, dan siklus hidup aset yang diperlukan dalam proses pengendalian dan optimalisasi penggunaan aset organisasi (Hastings., 2021:12-25). Dengan demikian, inventarisasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlangsungan aset perusahaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan penelitian ini dapat dianalisis melalui konsep hifz al-mal, yaitu perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama maqashid syariah. Hifz al-mal menekankan pentingnya menjaga harta dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, pemborosan, maupun pengelolaan yang tidak produktif. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan menjaga keamanan dan keberlanjutan manfaat aset dapat dipandang sebagai bentuk implementasi maqashid syariah.

Jasser Auda menjelaskan bahwa paradigma maqashid syariah kontemporer tidak hanya berorientasi pada perlindungan (*protection*) tetapi juga pengembangan (*development*) dan optimalisasi manfaat (*enhancement*) dari suatu sumber daya (Auda, 2022:247-255). Dalam konteks ini, sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) tidak hanya berfungsi menjaga keberadaan aset perusahaan, tetapi juga membantu organisasi memanfaatkan aset secara lebih efektif dan produktif.

Penggunaan QR Code dan identifikasi aset yang terstandarisasi menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk memperkuat kontrol terhadap aset yang dimiliki. Selain mempermudah proses pelacakan aset, sistem tersebut juga membantu mempercepat proses audit dan verifikasi data sehingga potensi terjadinya aset tidak tercatat (*unrecorded asset*), aset hilang (*missing asset*), maupun aset menganggur (*idle asset*) dapat diminimalkan.

Namun demikian, implementasi hifz al-mal dalam pengelolaan aset tidak hanya dapat diukur dari kemampuan perusahaan menjaga keberadaan aset. Hifz al-mal juga menuntut adanya optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat utilisasi aset, efektivitas penggunaan aset, biaya pemeliharaan, dan kontribusi aset terhadap kinerja organisasi perlu menjadi bagian dari pengelolaan aset yang berbasis maqashid syariah.

Selain itu, penggunaan Microsoft Excel sebagai media utama inventarisasi masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait integrasi data, keamanan informasi, dan kemampuan monitoring secara real-time. Apabila perusahaan ingin meningkatkan kualitas

perlindungan aset, pengembangan sistem inventaris berbasis database atau aplikasi asset management terintegrasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk mendukung implementasi hifz al-mal secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) yang diterapkan di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta telah mendukung implementasi prinsip hifz al-mal melalui kegiatan identifikasi, pencatatan, pengawasan, dan verifikasi aset secara sistematis. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset perusahaan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga dan mengoptimalkan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

**Sistem Inventaris ICT dan Efisiensi (*Al-Kafa'ah*) Pengelolaan Aset**

Selain prinsip amanah dan *hifz al-mal*, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya prinsip efisiensi (*al-kafa'ah*) dalam pengelolaan sumber daya. Konsep *al-kafa'ah* mengandung makna bahwa setiap sumber daya yang dimiliki, baik berupa harta, aset, tenaga kerja, waktu, maupun teknologi, harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa menimbulkan pemborosan (*israf*) maupun penyia-nyiaan (*tabdzir*) (Rozalinda, 2022:145).

Berdasarkan hasil penelitian, sistem inventaris ICT yang diterapkan di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta berperan penting dalam mendukung efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Melalui pendataan inventaris yang dilakukan secara sistematis, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah aset, kondisi aset, lokasi penyimpanan, status penggunaan, serta kebutuhan pemeliharaan aset. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aset secara lebih efektif dan terencana.

Dalam perspektif ekonomi Islam, al-kafa'ah dapat dipahami sebagai kecakapan dan ketepatan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pada pengelolaan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT), kecakapan tersebut tercermin melalui kemampuan petugas menggunakan informasi aset untuk mendukung pemeriksaan, pencarian, pencatatan, dan pengawasan peralatan. Penggunaan kode FA, nomor IAS, QR Code, serta daftar inventaris dapat membantu proses identifikasi dan pencocokan data. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem inventaris memiliki potensi mendukung efisiensi administrasi. Namun, penelitian belum menyajikan perbandingan waktu kerja, biaya pemeliharaan, tingkat kesalahan pencatatan, atau jumlah aset yang berhasil dioptimalkan. Karena itu, penelitian ini belum dapat menyimpulkan adanya penghematan biaya atau peningkatan efisiensi secara

terukur. Dengan adanya data yang terdokumentasi secara baik, perusahaan dapat mengetahui aset yang masih layak digunakan, aset yang memerlukan perbaikan, maupun aset yang perlu dilakukan penggantian. Kondisi ini membantu perusahaan menghindari pengadaan barang yang tidak diperlukan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah tersedia.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem inventaris tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan manajerial. Informasi inventaris yang akurat memungkinkan organisasi mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat, mengurangi risiko pemborosan anggaran, serta meningkatkan efektivitas penggunaan aset dalam mendukung operasional perusahaan.

Dalam perspektif manajemen aset, efisiensi pengelolaan aset berkaitan dengan kemampuan organisasi memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal sepanjang siklus hidup aset (*asset life cycle*). Menurut Nicholas A. J. Hastings, pengelolaan aset yang efektif memerlukan informasi yang akurat mengenai kondisi, lokasi, fungsi, dan nilai aset agar organisasi dapat memaksimalkan manfaat aset sekaligus meminimalkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Hastings, 2021, hlm. 18–25). Oleh karena itu, keberadaan sistem inventaris yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi organisasi.

Dari perspektif ekonomi Islam, efisiensi (*al-kafa'ah*) tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh hasil maksimal dengan biaya minimal sebagaimana dalam pendekatan ekonomi konvensional. Efisiensi juga mengandung dimensi moral yang menekankan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, produktif, dan bebas dari unsur pemborosan (*israf*) maupun penyia-nyiaan (*tabdzir*). Setiap aset yang dimiliki organisasi dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara optimal demi menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar.

Menurut Rozalinda, prinsip efisiensi dalam ekonomi Islam menuntut agar seluruh sumber daya digunakan secara tepat guna dan memberikan manfaat yang optimal tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Rozalinda, 2022, hlm. 145–152). Dalam konteks penelitian ini, kemampuan sistem inventaris dalam menyediakan data aset yang akurat memungkinkan perusahaan menghindari pengadaan yang berlebihan, mengurangi risiko aset menganggur (*idle asset*), serta meningkatkan efektivitas penggunaan peralatan yang tersedia.

Selain itu, penggunaan identitas aset dan QR Code turut mendukung efisiensi operasional karena mempercepat proses pencarian, verifikasi, dan monitoring aset. Proses inventarisasi yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dapat dilakukan secara lebih

cepat dan akurat sehingga mengurangi beban kerja administrasi serta meningkatkan produktivitas unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem inventaris masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media utama pengelolaan data. Meskipun relatif mudah digunakan dan ekonomis, penggunaan Excel memiliki keterbatasan dalam hal integrasi data, pembaruan informasi secara real-time, otomatisasi pelaporan, dan analisis aset secara komprehensif. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi tingkat efisiensi apabila jumlah aset yang dikelola terus meningkat dan kebutuhan informasi menjadi semakin kompleks.

Oleh karena itu, pengembangan sistem inventaris berbasis database atau aplikasi manajemen aset terintegrasi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset di masa mendatang. Sistem yang lebih terintegrasi memungkinkan proses monitoring, pelaporan, dan analisis aset dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efektif sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih berkualitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) telah berkontribusi dalam mewujudkan prinsip al-kafa'ah melalui penyediaan informasi aset yang akurat, pengurangan pemborosan sumber daya, optimalisasi penggunaan aset, dan peningkatan efektivitas pengelolaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem inventaris tidak hanya mendukung efisiensi operasional organisasi, tetapi juga menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

**Model Implementasi *Good Governance* Syariah dalam Pengelolaan Aset ICT**

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendataan inventaris ICT di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta menunjukkan adanya hubungan yang erat antara praktik pengelolaan aset perusahaan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* Syariah. Hubungan tersebut tercermin melalui berbagai aktivitas inventarisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai proses administrasi, tetapi juga menjadi sarana penerapan nilai-nilai tata kelola yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan aset, pelaporan berkala, verifikasi data, penggunaan QR Code, dan monitoring inventaris memiliki kontribusi terhadap terwujudnya transparansi, akuntabilitas, amanah, hifz al-mal, dan al-kafa'ah dalam pengelolaan aset *Information and Communication Technology* (ICT) (Lira Pilna, 2026).

System pendataan inventaris ICT memiliki kontribusi terhadap penerapan *Good Governance* Syariah melalui empat dimensi utama, yaitu:

**Tabel 3.** System pendataan inventaris ICT.

| Sistem Inventaris ICT | Prinsip *Good Governance* Syariah | Implementasi |
|---|---|---|
| Pencatatan aset | Transparansi | Informasi aset tersedia secara jelas |
| Pelaporan berkala | Akuntabilitas | Pertanggungjawaban pengelolaan aset |
| Verifikasi data | Amanah | Menjaga keakuratan dan kejujuran data |
| QR Code dan identitas aset | Hifz al-Mal | Perlindungan dan pengamanan aset |
| Monitoring inventaris | Al-Kafa'ah | Efisiensi penggunaan aset |

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem inventaris ICT bukan sekadar alat administrasi perusahaan, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung implementasi *Good Governance* berbasis Syariah. Melalui pengelolaan inventaris yang transparan, akuntabel, amanah, efisien, dan berorientasi pada perlindungan aset, perusahaan dapat mewujudkan tata kelola organisasi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pencatatan aset yang dilakukan secara sistematis memungkinkan informasi mengenai identitas, lokasi, spesifikasi, kondisi, dan status penggunaan aset tersedia secara jelas dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut mendukung prinsip transparansi karena informasi aset dapat diketahui dan diverifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan. Transparansi menjadi elemen penting dalam *Good Governance* Syariah karena mampu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan organisasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

Selain itu, pelaporan inventaris yang dilakukan secara berkala menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang mendukung prinsip akuntabilitas. Setiap perubahan kondisi aset dapat diketahui dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga proses pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun manajerial. Dalam konteks tata kelola syariah, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada organisasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan.

Verifikasi data inventaris yang dilakukan melalui pengecekan fisik dan pencocokan data administrasi menunjukkan implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan aset. Proses tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk menjaga keakuratan informasi, menghindari manipulasi data, serta memastikan bahwa aset yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Amanah menjadi fondasi utama dalam tata kelola syariah karena seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab.

Penggunaan QR Code, kode inventaris, dan identitas aset juga menunjukkan implementasi prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan harta. Melalui sistem identifikasi yang jelas, perusahaan dapat melakukan pelacakan aset secara lebih efektif sehingga risiko

kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, maupun kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan aset merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan agar harta dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi organisasi.

Sementara itu, kegiatan monitoring inventaris secara berkala mencerminkan implementasi prinsip *al-kafa'ah* atau efisiensi. Ketersediaan data inventaris yang akurat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan aset, menghindari pengadaan yang tidak diperlukan, mengurangi aset yang menganggur (*idle asset*), serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya organisasi. Dengan demikian, sistem inventaris tidak hanya berfungsi menjaga aset, tetapi juga membantu perusahaan memperoleh manfaat yang maksimal dari aset yang dimiliki.

Model ini memperlihatkan bahwa sistem inventaris merupakan instrumen pendukung tata kelola, bukan satu-satunya penentu keberhasilan *Good Governance* Syariah. Penerapannya tetap bergantung pada integritas petugas, pembagian kewenangan, prosedur pengawasan, dan konsistensi pelaksanaan administrasi aset. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan teknologi dan sistem informasi dalam organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola perusahaan.

Namun demikian, model yang dihasilkan masih berfokus pada aspek pengelolaan aset dan belum sepenuhnya mencakup seluruh dimensi *Good Governance* Syariah. Menurut berbagai literatur tata kelola syariah, *Good Governance* tidak hanya terdiri atas transparansi, akuntabilitas, amanah, dan efisiensi, tetapi juga mencakup prinsip keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab (*mas'uliyyah*), integritas, independensi, serta orientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, model yang disusun dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan dimensi-dimensi tersebut agar menghasilkan kerangka tata kelola syariah yang lebih komprehensif.

Selain itu, implementasi *Good Governance* Syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem inventaris yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, komitmen pimpinan, serta efektivitas pengawasan internal. Sistem inventaris yang modern sekalipun tidak akan mampu menghasilkan tata kelola yang baik apabila tidak didukung oleh integritas dan profesionalisme para pengelolanya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *Good Governance* Syariah memerlukan sinergi antara sistem, prosedur, teknologi, dan nilai-nilai etika yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen organisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventaris *Information and Communication Technology* (ICT) di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi *Good Governance* Syariah. Melalui pencatatan aset yang transparan, pelaporan yang akuntabel, verifikasi yang mencerminkan amanah, penggunaan identitas aset sebagai bentuk perlindungan harta, serta monitoring yang meningkatkan efisiensi, perusahaan telah menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan tata kelola aset yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem inventaris ICT dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendataan inventaris ICT di PT Angkasa Pura Support Cabang Yogyakarta berperan sebagai instrumen administratif untuk mendukung pengelolaan dan pengawasan aset perusahaan. Proses pendataan mencakup pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi dengan kondisi aktual, pencatatan menggunakan Microsoft Excel, pemberian identitas berupa kode FA, nomor IAS, dan QR Code, serta dokumentasi kondisi aset. Rangkaian kegiatan tersebut membantu petugas mengenali dan mencocokkan informasi aset dengan kondisi fisiknya.

Dalam perspektif *Good Governance* Syariah, praktik inventaris tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, amanah, hifz al-mal, dan al-kafa'ah. Ketersediaan informasi dan identitas aset mendukung transparansi administratif. Pemeriksaan, dokumentasi, dan pelaporan berkaitan dengan akuntabilitas. Tanggung jawab petugas dalam mengelola data dan menjaga aset mencerminkan dimensi amanah. Sementara itu, identifikasi dan pemeriksaan aset mendukung upaya perlindungan harta (hifz al-mal). Penggunaan informasi inventaris untuk menunjang pekerjaan administrasi juga menunjukkan potensi dukungan terhadap efisiensi atau al-kafa'ah.

Meskipun demikian, penelitian ini belum mengukur dampak sistem inventaris terhadap penurunan kehilangan aset, penghematan biaya, pengurangan kesalahan pencatatan, atau peningkatan kecepatan kerja. Penggunaan Microsoft Excel sebagai media utama juga memiliki keterbatasan potensial dalam hal integrasi data, pengelolaan akses, dan dokumentasi perubahan. Oleh karena itu, sistem inventaris yang berjalan dapat dinilai mendukung proses administrasi dan pengawasan aset, tetapi belum dapat dinyatakan telah menghasilkan peningkatan efisiensi yang terukur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu lokasi dan melibatkan tiga informan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan inventaris *Information and Communication Technology* (ICT). Temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh unit atau perusahaan lain. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan lebih banyak unit kerja, menggunakan data inventaris dalam periode yang lebih panjang, serta membandingkan indikator sebelum dan sesudah pengembangan sistem. Indikator tersebut dapat mencakup tingkat kesesuaian data dan kondisi fisik, waktu pencarian aset, frekuensi kesalahan pencatatan, biaya pemeliharaan, dan jumlah aset yang tidak ditemukan atau mengalami kerusakan.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Kadir. (2020). *Pengenalan Sistem Informasi* (Edisi Revi). Andi Offiset.

Ascarya. (2020). *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Digital*. Bank Indonesia Institute.

dewi, sandra and Shandy, Andrew, U. (2020). *Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 21–25.

Fadli, Ahmad, Ridho Hafizh Maulana, dan S. (2023). Perancangan Sistem Pendataan Material Berbasis Website pada Pengelolaan Gudang. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, *7*(2), 112–124.

Fredy Dwi Herlyanto. (2020). Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 36–40.

Harahap, S. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, *2*(4). https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i4.1035

Iqbal, M., & others. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(2). https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1446

James A. Hall. (2023). *Accounting Information Systems* (11th Editi). Cengage Learning.

Jasser Auda. (2022). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.

Kokanda, K. dan I. S. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Stok Barang Menggunakan Sistem Inventory Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Digital*, *5*(1), 15–28.

Laudon & Laudon. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (17th Editi). Pearson Education.

Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Remaja Rosdakarya.

Lira Pilna. (2026). Sistem Pendataan Inventaris Peralatan Information and Communication Technology (ICT) di Gudang PT Angkasa Pura Suport Cabang Yogyakarta. *Tugas Akhir*, 56.

Mardani. (2020). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Andi Offiset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* ((3rd ed.)). SAGE Publications.

Mohammad Hashim Kamali. (2021). *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shariah.* (Revised Ed). Ilmiah Publishers.

Nicholas A. J. Hastings. (2021). *Physical Asset Management: With an Introduction to the ISO 55000 Series of Standards* (Edisi ke-2). Springer Nature Switzerland AG.

Nisa, K., & others. (2026). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kepatuhan Perusahaan dalam Menunaikan Zakat Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi: Studi pada Seluruh Bank Syariah. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, *4*(4). https://doi.org/10.61132/menawan.v4i4.2420

Retno, Sujacka, Cut Agusniar, dan I. S. S. (2020). Digitalisasi Sistem Inventaris Barang pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *11*(2), 145–156.

Rifqi Muhammad. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Wahana Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *23*(2), 239–259. https://doi.org/https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188

Rozalinda. (2022). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo Persada.

Sandini, S., & others. (2025). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Periode 2019--2023. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(3). https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2582

Septian, & others. (2026). Analisis Hubungan Good Corporate Governance dengan Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, *4*(3). https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v4i3.6340

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.